

Bogor, 21 Januari 2025

Nomor : 06/001/PKT/2025

Lampiran : -

Perihal : **Surat Terbuka Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto**

Kepada Yth.

Bapak Prabowo Subianto

Presiden Republik Indonesia

Di tempat

Dengan hormat,

Kami, Kaoem Telapak, sebagai organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap kelestarian lingkungan serta berkomitmen pada upaya perbaikan tata kelola sektor kehutanan di Indonesia. Hari ini adalah **100 hari pertama masa kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia**. Kami memandang momentum ini penting untuk arah kebijakan strategis pemerintah, terutama terkait lingkungan dan tata kelola sumber daya alam. Pidato Bapak Presiden dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 relevan sebagai acuan untuk mengelola kelapa sawit secara strategis sambil menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dalam pidato tersebut, Bapak menekankan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang sangat dibutuhkan dunia, dengan perannya dalam berbagai industri seperti cokelat, deterjen, dan kosmetik. Bapak juga memberikan arahan kepada bupati, gubernur, pejabat, tentara, dan polisi untuk menjaga kebun kelapa sawit sebagai aset negara, seraya menegaskan bahwa kelapa sawit adalah pohon yang mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Selain itu, Bapak menyoroti bahwa tuduhan deforestasi yang dialamatkan pada industri kelapa sawit dianggap tidak relevan karena pohon sawit sendiri memiliki manfaat ekologis, serta menegaskan pentingnya sikap percaya diri Indonesia dalam menghadapi tekanan negara-negara seperti Uni Eropa terkait isu tersebut¹.

Kami memahami pentingnya peran strategis kelapa sawit untuk kedaulatan ekonomi bangsa. Namun, kami merasa perlu memberikan informasi tambahan yang berbasis data dan kajian, yang kiranya dapat menjadi masukan strategis untuk mendukung keberlanjutan industri ini tanpa merugikan daya dukung lingkungan, hak masyarakat, dan posisi internasional Indonesia.

¹ Ibid.

Kajian kami tentang kebijakan industri kelapa sawit dilihat dari perspektif ekonomi dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) menunjukkan beberapa temuan krusial:

1. Deforestasi dan Krisis Lingkungan Hidup

Hutan primer dan lahan gambut memiliki kapasitas penyerapan karbon yang jauh lebih besar dibandingkan perkebunan sawit. Konversi hutan menjadi kebun sawit tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga melepaskan karbon yang tersimpan di dalam tanah, memperburuk krisis iklim. Pada tahun 2021-2022, perkebunan sawit diperkirakan menjadi salah satu kontributor utama deforestasi di Indonesia, melepaskan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 200 juta metrik ton per tahun. Data dari *The TreeMap* menunjukkan bahwa pada tahun 2023, ekspansi perkebunan sawit di Indonesia telah menyebabkan konversi 30.000 hektare hutan, meningkat sebesar 36% dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Kapasitas Lingkungan yang Mendekati Ambang Batas

Beberapa wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua menunjukkan bahwa luas perkebunan sawit yang ada telah melampaui daya dukung ekosistem, mengancam keseimbangan ekologis.

3. Konflik Agraria yang Kronis

Terdapat lebih dari 1.100 kasus konflik di area perkebunan sawit, sebagian besar dipicu oleh perolehan lahan tanpa persetujuan masyarakat, pelanggaran skema plasma, dan perizinan yang tidak sesuai prosedur.

4. Sawit secara langsung berdampak pada kondisi biodiversitas.

Ekspansi pertanian termasuk sawit merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan dataran rendah dengan kekayaan spesies paling tinggi di dunia. Oleh karena itu, ekspansi sawit yang banyak terjadi di hutan dataran rendah menjadi ancaman luar biasa terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia.

5. Produktivitas Sawit yang Rendah

Produktivitas nasional saat ini berada pada kisaran 3,6 ton CPO per hektar, jauh di bawah potensi optimal sebesar 6-8 ton per hektar. Dengan penerapan teknologi *replanting* dan praktik *good agriculture*, produktivitas dapat ditingkatkan tanpa memerlukan ekspansi lahan baru.

6. Dampak Positif Moratorium

Kajian kami menunjukkan bahwa moratorium sawit yang didukung oleh program *replanting* dapat menciptakan *output* ekonomi hingga Rp30,5 triliun pada tahun 2045,

dibandingkan dengan skenario tanpa moratorium yang diproyeksikan justru menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp30,4 triliun. Program ini juga dapat menciptakan hingga 827.000 lapangan kerja dalam jangka panjang.

Rekomendasi Strategis

1. Peningkatan Produktivitas Tanpa Ekspansi Lahan

Fokus pada peremajaan perkebunan dan penerapan praktik *good agriculture* untuk memaksimalkan produktivitas, yang dapat menghasilkan pendapatan lebih besar tanpa pembukaan lahan baru.

2. Penguatan Kebijakan Moratorium

Pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Presiden yang memperkuat moratorium kelapa sawit, termasuk penghentian izin baru dan penguatan tata kelola berbasis prinsip keberlanjutan.

3. Penegakan Hukum dan Penyelesaian Konflik

Sanksi tegas perlu diberikan kepada perusahaan sawit yang melanggar peraturan, terutama terkait kawasan hutan dan hak masyarakat adat.

4. Diversifikasi Produk dan Hilirisasi Sawit

Mengarahkan kebijakan pada pengembangan produk hilir seperti bioenergi dan oleokimia untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Pidato Bapak menegaskan pentingnya kelapa sawit sebagai aset nasional yang strategis. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat dan berbasis pada prinsip keberlanjutan, kami yakin kelapa sawit tidak hanya menjadi komoditas unggulan domestik, tetapi juga simbol komitmen Indonesia pada keberlanjutan global.

Kami berharap masukan ini dapat menjadi bahan pertimbangan Bapak dalam mendukung pengelolaan kelapa sawit yang lebih baik. Atas perhatian dan kebijakan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

A handwritten signature in black ink, overlaid on a blue and white Kaoem Telapak logo.

Abu Meridian

Campaign Leader Kaoem Telapak